

Di Provinsi Aceh

Muhammad Nizar, Mohd. Nur Syechalad, dan Eddy Gunawan

ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI ACEH

Abstract

The purpose of this research is to ascertain the differences of development growth between expansion and main districts, also to determine the factors that influence human development in the expansion and main districts in Aceh Province. This research used descriptive analysis and panel data regression. The descriptive analysis showed that in 10 regencies and cities, expansion is effective because the HDI growth is higher than the main districts. namely: Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie Jaya, Langsa and Lhokseumawe. Whereas in 3 regencies/cities, expansion is not effective namely, Gayo Lues, Aceh Tamiang and Subulussalam. The panel data regression results showed that significantly influence HDI in expansion and main districts are GDP per capita and proverty, whereas unemployment rate was not significant. GDP per capita showed positive influence, while proverty had negative influence to HDI. GDP per capita's influence to HDI is greater, while proverty's influence is greater in main districts.

Muhammad Nizar

Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala
mnizar471@gmail.com

Mohd. Nur Syechalad

Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala

Eddy Gunawan

Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi
dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala

Keywords:

analysis, regional expansion, human
development

PENDAHULUAN

Salah satu perubahan sosial politik yang dialami Indonesia adalah desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Tonggak awal berlakunya otonomi daerah adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sebelum diberlakukannya desentralisasi, pembangunan dilakukan secara sentralistik yang berdampak terhadap besarnya ketimpangan pembangunan antar daerah. Dengan sistem otonomi, daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing sehingga dapat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat dan merata.

Aceh merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki nilai IPM berada di bawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2017, IPM Aceh sebesar 70,6, masih berada di bawah IPM Indonesia yaitu 70,81 (BPS, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Aceh masih relatif tertinggal dibandingkan daerah lain di Indonesia. Selain IPM, indikator lain yang sangat penting untuk mengukur kinerja pembangunan manusia adalah angka kemiskinan. Provinsi Aceh adalah provinsi di Indonesia yang mempunyai angka kemiskinan sangat tinggi. Menurut data BPS, pada Maret 2018 persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 16,89 persen jauh diatas rata-rata nasional yang hanya sebesar 9,82 persen. Angka ini menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi se-Sumatera atau keenam se-Indonesia setelah Gorontalo, Maluku, NTT, Papua Barat dan Papua. Provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia ini berada pada kondisi yang hampir sama dengan provinsi di bagian timur Indonesia yang kondisinya relatif tertinggal.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemekaran daerah marak terjadi hampir di semua wilayah di Indonesia. Di Provinsi Aceh tercatat sebanyak 13 kabupaten/kota melakukan pemekaran dari awal 10 daerah induk, antara lain: Simeulue, Aceh Singkil, Bireun, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie Jaya, Lhokseumawe, Langsa dan Subulussalam.

Tabel 1
Daftar Kabupaten/Kota Pemekaran di Aceh Sejak Tahun 1999

No	Kab/Kota Pemekaran	Kabupaten Induk	Tahun Pemekaran
1	Simeulue	Aceh Barat	1999
2	Aceh Singkil	Aceh Selatan	1999
3	Bireuen	Aceh Utara	1999
4	Aceh Barat Daya	Aceh Selatan	2002
5	Gayo Lues	Aceh Tenggara	2002
6	Aceh Tamiang	Aceh Timur	2002
7	Nagan Raya	Aceh Barat	2002
8	Aceh Jaya	Aceh Barat	2002
9	Bener Meriah	Aceh Tengah	2003
10	Pidie Jaya	Pidie	2007
11	Langsa	Aceh Timur	2001
12	Lhokseumawe	Aceh Utara	2001
13	Subulussalam	Aceh Singkil	2007

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2015

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul usulan baru pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pro dan kontra berkembang di masyarakat ketika wacana pemekaran daerah mengemuka. Diantara alasan yang pro adalah perlunya percepatan dan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Tidak sedikit juga yang kontra melontarkan tuduhan bahwa isu pemekaran hanyalah bersifat politis untuk kepentingan segelintir elit daerah yang menginginkan jabatan di daerah pemekaran baru. Diperlukan kajian yang mendalam dan menyeluruh sebelum memutuskan pemekaran daerah baru. Penelitian ini ingin melihat apakah pemekaran daerah di Provinsi Aceh sudah efektif dalam mencapai tujuan pembangunan manusia? Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan pembentukan daerah pemekaran baru di masa mendatang baik bagi Pemerintah Pusat, Provinsi Aceh maupun provinsi lain.

TINJAUAN TEORITIS

Menurut Balkar dan Kasurka (2015) pengembangan dan pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebaiknya dilakukan pada lebih banyak tempat untuk mengurangi ketimpangan daerah karena dengan desentralisasi akan lebih diketahui apa yang dibutuhkan oleh daerah. Pemekaran wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa wilayah kabupaten baru pada dasarnya merupakan upaya untuk

meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten baru yang dibentuk diperlukan keseimbangan antara basis sumberdaya antara satu dengan yang lainnya. Hal ini perlu diupayakan agar tidak terjadi disparitas yang mencolok di masa yang akan datang. Selanjutnya, dalam usaha pembentukan wilayah pemekaran perlu dibentuk ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif masyarakat di suatu wilayah pemekaran.

Menurut Todaro (1998), sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi dari bangsa yang bersangkutan. Hal senada dikatakan oleh Rens dalam Jhingan (2003) yang mengatakan bahwa di negara yang mencoba mempercepat pembangunan ekonominya, ditemukan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting disamping modal dalam mencapai tujuan pembangunan.

The United Nations Development Program (UNDP, 2016) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat, (2) Pengetahuan, (3) Standar hidup layak.

Berdasarkan isu penelitian yaitu tentang pemekaran daerah dan pembangunan manusia, beberapa penelitian sebelumnya yang cukup relevan dengan penelitian ini antara lain dari Soejoto *et al* (2015) yang meneliti tentang peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia melalui desentralisasi fiskal. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kebijakan dana desentralisasi mempunyai dampak positif terhadap pembangunan manusia pada setiap daerah otonomi. Selanjutnya penelitian Jumadi *et al* (2013) meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Salah satu hasil temuannya yaitu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dan pembangunan manusia.

Penelitian ini ingin mengukur efektivitas pemekaran daerah di Provinsi Aceh dengan cara melihat perbandingan capaian pembangunan antara daerah induk dan pemekaran. Selanjutnya ingin dilihat juga faktor-faktor yang mempengaruhi capaian IPM dari masing-masing daerah induk dan pemekaran melalui indikator PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran.

Hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian ini yaitu: (1) diduga pertumbuhan pembangunan daerah pemekaran lebih tinggi dibandingkan daerah induk dan (2) diduga PDRB per kapita mempunyai pengaruh positif terhadap IPM, kemiskinan mempunyai pengaruh negatif terhadap IPM, dan pengangguran mempunyai pengaruh negatif terhadap IPM.

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Aceh, yaitu sebanyak 23 kabupaten/kota yang terbagi kedalam kelompok daerah induk dan daerah pemekaran. Batasan tahun pemekaran dalam penelitian ini yaitu setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2017.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), antara lain: data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Data yang dikumpulkan berupa data panel, yaitu gabungan data *cross section* (23 kabupaten/kota) dan *time series* (periode 2010-2015). *Series* yang digunakan tidak sampai tahun 2016 dikarenakan untuk indikator pengangguran datanya tidak tersedia pada tahun tersebut (Pada tahun 2016 Sakernas tidak dilaksanakan untuk level kabupaten/kota).

Model penelitian yang dibentuk oleh peneliti didasarkan pada hasil temuan penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang determinan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menemukan bahwa beberapa variabel yang mempengaruhi IPM antara lain PDRB per kapita, tingkat kemiskinan dan pengangguran. PDRB per kapita digunakan dalam penelitian Arisman (2018), Eren (2014) dan Cahill (2005). Selanjutnya variabel kemiskinan digunakan dalam penelitian Singariya (2014) dan Sofilda *et al* (2013). Dan variabel pengangguran ditemukan dalam penelitian Chalid dan Yusuf (2014) dan Sofilda *et al* (2015). Mengacu pada penelitian-penelitian tersebut, model yang dibentuk pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 Kemiskinan_{it} + \beta_3 Pengangguran_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

dimana:

IPM_{it} : IPM Kabupaten/Kota ke-i tahun ke-t

$PDRB_{it}$: PDRB per kapita Kabupaten/Kota ke-i tahun ke-t

$Kemiskinan_{it}$: Kemiskinan Kabupaten/Kota ke-i tahun ke-t
$Pengangguran_{it}$: Pengangguran Kabupaten/Kota ke-i tahun ke-t
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$: Parameter
ε	: Residual atau kesalahan pengganggu ke-i
i	: Kabupaten/Kota ke-i
t	: Tahun ke-t

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Pertumbuhan Pembangunan Manusia antara Daerah Pemekaran dan Induk di Provinsi Aceh

Untuk melihat tingkat pembangunan yang sudah dilakukan pada suatu daerah maka kita dapat melihat dari indikator pembangunan yang sudah dicapai. Dalam membandingkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai di daerah pemekaran dengan daerah induknya maka dapat dibandingkan indikator pembangunan yang telah dicapai pada masing-masing daerah. Indikator pembangunan secara makro yang dapat digunakan untuk mengukur capaian pembangunan diantaranya yang paling terkenal adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana indikator ini melihat pembangunan dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi secara bersamaan.

Pada penelitian ini, penulis membuat pengelompokkan untuk membedakan status efektivitas Kabupaten/Kota pemekaran yaitu efektif dan tidak efektif. Kabupaten/kota pemekaran dinilai efektif jika mempunyai rata-rata pertumbuhan IPM per tahun lebih tinggi dari kabupaten induknya, atau selisihnya bernilai positif. Sebaliknya dikatakan tidak efektif jika memiliki rata-rata pertumbuhan IPM per tahun lebih rendah dari kabupaten induknya, atau selisihnya bernilai negatif.

Dari Tabel 2 diketahui sebanyak 10 kabupaten/kota pemekaran tergolong efektif dalam pembangunan manusia karena memiliki pertumbuhan IPM per tahun yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten induknya. Kabupaten/kota tersebut antara lain: Simeulue, Aceh Singkil, Bireun, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie Jaya, Langsa dan Lhokseumawe. Diantara kabupaten/kota tersebut, Aceh Singkil merupakan kabupaten pemekaran yang paling efektif karena mempunyai selisih nilai pertumbuhan tertinggi dibandingkan daerah induknya Aceh Selatan sebesar 0,326 poin. Secara geografis jarak kedua ibukota daerah tersebut cukup jauh, dan dengan kemandirian ekonomi dari sektor perkebunan, pemekaran Aceh Singkil terbukti sangat tepat.

Tabel 2
Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Pemekaran dan Kabupaten Induk
Tahun 2010-2016

Kab/Kota Pemekaran	Kab. Induk	Pertumbuhan IPM Kab/Kota Pemekaran	Pertumbuhan IPM Kab. Induk	Selisih Pertumbuhan IPM Kab./Kota Pemekaran dan Induk	Status Kab/Kota Pemekaran
Simeulue	Aceh Barat	0,513	0,472	0,051	Efektif
Aceh Singkil	Aceh Selatan	0,739	0,422	0,317	Efektif
Bireuen	Aceh Utara	0,680	0,668	0,012	Efektif
Aceh Barat Daya	Aceh Selatan	0,573	0,413	0,160	Efektif
Gayo Lues	Aceh Tenggara	0,549	0,600	-0,051	Tidak Efektif
Aceh Tamiang	Aceh Timur	0,473	0,570	-0,097	Tidak Efektif
Nagan Raya	Aceh Barat	0,633	0,475	0,158	Efektif
Aceh Jaya	Aceh Barat	0,557	0,474	0,083	Efektif
Bener Meriah	Aceh Tengah	0,667	0,478	0,189	Efektif
Pidie Jaya	Pidie	0,423	0,385	0,038	Efektif
Langsa	Aceh Timur	0,600	0,550	0,050	Efektif
Lhokseumawe	Aceh Utara	0,713	0,659	0,054	Efektif
Subulussalam	Aceh Singkil	0,470	0,748	-0,268	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah dengan *MS Excel*

Sementara itu, kabupaten/kota yang tergolong belum efektif ada 3 daerah, yaitu: Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Subulussalam. Dari ketiganya, Subulussalam merupakan yang paling tidak efektif dengan selisih nilai pertumbuhan IPM dari Aceh Singkil sebesar minus 0,268 poin. Aspek pendidikan disinyalir sebagai faktor pengurang pembangunan manusia di Subulussalam yang berstatus perkotaan karena secara ekonomi lebih baik dari Aceh Singkil.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia di Daerah Pemekaran dan Induk di Provinsi Aceh

Pada penelitian ini, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia akan dianalisis dengan regresi data panel. Menurut Baltagi (2005) kelebihan data panel yaitu dapat mempelajari dinamika perubahan dan mengukur dampak suatu peristiwa. Dalam penelitian ini yang

ingin diukur adalah capaian pembangunan manusia dampak dari pemekaran daerah yang tercermin dari IPM.

Pemilihan Model

Sebelum melakukan estimasi, tahap awal dari regresi data panel adalah melakukan uji *Chow* untuk memilih metode *common effect* atau *fixed effect*. Selanjutnya dilakukan uji *Hausman* untuk memilih antara *fixed effect* atau *random effect* dan uji *Lagrange Multiplier* untuk memilih antara metode *common effect* atau *random effect*. Estimasi pada penelitian ini dilakukan secara terpisah antara daerah pemekaran dan daerah induk. Sehingga pemilihan model regresi data panel yang paling tepat digunakan juga akan dilakukan secara terpisah pada masing-masing daerah pemekaran dan daerah induk.

Pemilihan Model Daerah Pemekaran

Sebelum melakukan estimasi pada daerah pemekaran, akan dilakukan uji *Chow* untuk memilih metode *common effect* atau *fixed effect* yang lebih tepat digunakan.

**Tabel 3
Chow Test**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	103.175604	(11,57)	0.0000
Cross-section Chi-square	218.900105	11	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan data dengan *Eviews*

Dari hasil pengolahan diperoleh nilai Probabilitas dibawah 0,05 sehingga disimpulkan bahwa model menggunakan *fixed effect*. Selanjutnya dilakukan uji *Hausman* untuk memilih antara *fixed effect* atau *random effect*.

**Tabel 4
Hausman Test**

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.031162	3	0.7937

Sumber: Hasil pengolahan data dengan *Eviews*

Dari hasil pengolahan diperoleh nilai Probabilitas probabilitas 0,793 sehingga disimpulkan menggunakan metode *random effect* yang lebih tepat dibandingkan metode *fixed effect*.

Pemilihan Model Daerah Induk

Tahapan yang dilakukan untuk mengestimasi daerah induk sama dengan daerah pemekaran. Pada uji *Chow*, diperoleh nilai probabilitas kurang dari 0,05 sehingga disimpulkan menggunakan *fixed effect*.

**Tabel 5
Chow Test**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	362.691809	(10,52)	0.0000
Cross-section Chi-square	281.102598	10	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan data dengan *Eviews*

Selanjutnya pada uji Hausman diperoleh probabilitas diatas 0,05, sehingga disimpulkan menggunakan model *random effect* yang lebih tepat dibandingkan model *fixed effect*.

**Tabel 6
Hausman Test**

Test Summary	Chi-Sq.	Chi-Sq. d.f.	Prob.
	Statistic		
Cross-section random	4.368687	3	0.2243

Sumber: Hasil pengolahan data dengan *Eviews*

Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi, sebelum dilakukan estimasi maka terlebih dahulu harus dilakukan pengujian asumsi agar tidak terjadi pelanggaran, sehingga hasil estimasi dapat dipercaya keakuratannya. Beberapa asumsi yang akan diuji antara lain: normalitas, multikolinearistas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Uji Asumsi Klasik Daerah Pemekaran

Uji Normalitas

Uji normalitas harus dilakukan sebelum dilakukan estimasi untuk memastikan bahwa nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Salah satu alat uji untuk menguji asumsi normalitas adalah Jarque-Bera.

Tabel 7
Hasil Uji Jarque-Bera

Statistic	Prob.
Jarque-Bera	0.051765

Sumber: Hasil pengolahan data dengan *Eviews*

Hasil uji normalitas dengan Jarque-Bera menunjukkan probabilitas sebesar 0,0517 dimana lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan terima H_1 atau yang berarti residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah terjadinya korelasi linier antar variabel bebas. Untuk melihat ada tidaknya korelasi linier antar variabel bebas dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel bebas. Jika nilai korelasi diatas 0,8 maka dapat dikatakan terjadi korelasi yang linier yang kuat antar variabel bebas.

Tabel 8
Correlation

	Kemiskinan	PDRB Per Kapita	Pengangguran
Kemiskinan			
PDRB Per Kapita	-0.5088		
Pengangguran	-0.5237	0.0499	

Sumber: Hasil pengolahan data dengan *Eviews*

Dari tabel hasil pengolahan diketahui bahwa nilai korelasi untuk setiap variabel dibawah 0,8 sehingga dapat dikatakan tidak ada korelasi linier yang kuat antar variabel bebas atau dengan kata lain tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau ruang. Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan Uji Durbin-Watson (DW).

Tabel 9
Hasil Uji Durbin-Watson

Statistic	P-value
Durbin-Watson stat	1.726

Sumber: Hasil pengolahan data dengan *Eviews*

Berdasarkan Tabel 9 diketahui nilai DW sebesar 1,726. Nilai d_L , d_U , $4 - d_U$, $4 - d_L$ (untuk $k = 3$ dan $n = 72$) masing-masing sebesar 1,383, 1,551, 2,449 dan 2,617 (untuk alpha 5%). Nilai DW terletak antara d_U dan $4 - d_U$ maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tersebut tidak mengandung masalah autokorelasi.

Uji Asumsi Klasik Daerah Induk

Uji Normalitas

Uji normalitas harus dilakukan sebelum dilakukan estimasi untuk memastikan bahwa nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Salah satu alat untuk menguji asumsi normalitas adalah Jarque-Bera.

Tabel 10
Statistik Jarque-Bera

Statistic	Prob.
Jarque-Bera	0.061213

Sumber: Hasil pengolahan data dengan *Eviews*

Hasil uji normalitas dengan Jarque-Bera menunjukkan p value sebesar 0,0612 dimana lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan terima H_1 atau yang berarti residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah terjadinya korelasi linier antar variabel bebas. Untuk melihat ada tidaknya korelasi linier antar variabel bebas dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel bebas. Jika nilai korelasi diatas 0,8 maka dapat dikatakan terjadi korelasi yang linier yang kuat antar variabel bebas.

Tabel 11. Correlation

	Kemiskinan	PDRB Per Kapita	Pengangguran
Kemiskinan			
PDRB Per Kapita	-0.3657		
Pengangguran	-0.1684	0.6810	

Sumber: Hasil pengolahan data dengan *Eviews*

Dari Tabel 11 diketahui bahwa nilai korelasi untuk setiap variabel dibawah 0,8 sehingga dapat dikatakan tidak ada korelasi linier yang kuat antar variabel bebas atau dengan kata lain tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu atau ruang. Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan Uji Durbin-Watson (DW).

**Tabel 12
Hasil Uji Durbin-Watson**

Statistic	P-value
Durbin-Watson stat	1.601

Sumber: Hasil pengolahan data dengan *Eviews*

Berdasarkan Tabel 12 diketahui nilai DW sebesar 1,601. Nilai d_L , d_U , $4 - d_U$, $4 - d_L$ (untuk $k = 3$ dan $n = 66$) masing-masing sebesar 1,346, 1,534, 2,466 dan 2,654 (untuk alpha 5%). Nilai DW terletak antara d_U dan $4 - d_U$ maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tersebut tidak mengandung masalah autokorelasi.

Hasil Estimasi

Estimasi dilakukan pada masing-masing daerah pemekaran dan daerah induk. Hasil estimasi pada kedua kelompok daerah tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia pada kedua kelompok daerah tersebut.

Hasil Estimasi Daerah Pemekaran

Setelah melalui serangkaian uji asumsi dan kesesuaian model diperoleh hasil estimasi seperti dibawah ini.

Tabel 13
Hasil Estimasi Regresi Data Panel Untuk Daerah Pemekaran

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
PDRB Perkapita	0.129298	0.050933	2.518.939	0.0142
Kemiskinan	-0.430321	0.078521	-5.467.627	0.0000
Pengangguran	0.021571	0.044974	0.457407	0.6489
C	71.17973	2.723.168	2.613.857	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan data dengan *Eviews*

Berdasarkan Tabel 13, diketahui faktor-faktor yang signifikan secara statistik mempengaruhi IPM di daerah pemekaran adalah PDRB perkapita dan kemiskinan karena nilai probabilitasnya dibawah tingkat kesalahan yang ditetapkan sebesar 5 persen, sedangkan pengangguran tidak signifikan karena nilai probabilitasnya diatas 5 persen. PDRB per kapita menunjukkan pengaruh positif terhadap IPM artinya semakin besar PDRB per kapita maka IPM akan semakin tinggi. Peningkatan PDRB perkapita sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan IPM sebesar 0,129 poin. Sementara itu, kemiskinan mempunyai pengaruh negatif terhadap IPM, yang berarti semakin rendah kemiskinan maka IPM akan semakin tinggi. Penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen akan meningkatkan IPM sebesar 0,430 poin.

Hasil Estimasi Daerah Induk

Setelah melalui uji asumsi diperoleh hasil estimasi untuk daerah induk sebagai berikut.

Tabel 14
Hasil Estimasi Regresi Data Panel Untuk Daerah Induk

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
PDRB Perkapita	0.109909	0.028039	3.919830	0.0002
Kemiskinan	-0.466300	0.058734	-7.939169	0.0000
Pengangguran	0.022270	0.026000	0.856541	0.3950
C	73.84021	2.020957	36.53725	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan data dengan *Eviews*

Tidak berbeda dengan daerah pemekaran, hasil estimasi untuk daerah induk menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi IPM adalah PDRB per kapita dan kemiskinan. Sementara pengangguran menunjukkan hasil yang tidak signifikan secara statistik. PDRB per kapita menunjukkan pengaruh yang positif terhadap IPM. Peningkatan PDRB per kapita sebesar 1 juta rupiah akan mendongkrak IPM sebanyak 0,1 poin. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Eren *et al* (2014) yang menemukan bahwa PDRB per kapita menjadi salah satu determinan yang berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia.

Sementara itu, angka kemiskinan menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap IPM. Penurunan kemiskinan sebesar 1 persen akan mampu menaikkan IPM sebesar 0,466 persen. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sofilda *et al* (2013) bahwa kemiskinan mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap IPM, juga Singariya (2014) yang menemukan dalam hasil penelitiannya bahwa kemiskinan menjadi faktor pengurang terhadap nilai IPM.

Apabila kita bandingkan pengaruh setiap determinan terhadap IPM antara daerah pemekaran dengan daerah induk, ternyata pengaruh PDRB per kapita lebih besar di daerah pemekaran dibandingkan daerah induk (0,129 berbanding 0,109). Artinya daerah pemekaran mampu memaksimalkan potensi ekonomi yang lebih besar pengaruhnya terhadap pembangunan manusia dibandingkan daerah induk. Sementara untuk kemiskinan, diketahui bahwa penurunan kemiskinan di daerah induk mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap IPM dibandingkan daerah pemekaran (0,466 berbanding 0,430). Artinya program kemiskinan di daerah induk selama ini berjalan lebih efektif dibandingkan daerah pemekaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pertumbuhan IPM per tahun, sebanyak 10 kabupaten/kota pemekaran tergolong efektif karena memiliki pertumbuhan IPM yang lebih tinggi dibandingkan daerah induknya, yaitu: Simeulue, Aceh Singkil, Bireun, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Jaya, Bener Meriah, Pidie Jaya, Kota Langsa dan Kota Lhokseumawe. Sementara 3 kabupaten/kota pemekaran tergolong tidak efektif yaitu Gayo Lues, Aceh Tamiang dan Kota Subulussalam.

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi IPM di daerah pemekaran dan daerah induk adalah PDRB per kapita dan kemiskinan. Sedangkan pengangguran menunjukkan hasil yang tidak signifikan. PDRB per kapita menunjukkan pengaruh

positif, sedangkan kemiskinan mempunyai pengaruh negatif terhadap IPM. Pengaruh PDRB per kapita terhadap IPM lebih besar di daerah pemekaran, sedangkan pengaruh kemiskinan lebih besar di daerah induk.

Saran

Pemerintah Provinsi Aceh dapat menjadikan contoh kabupaten/kota yang menunjukkan efektivitas dalam pembangunan manusia (pertumbuhan IPM tinggi) dan mengkaji upaya-upaya yang dilakukan untuk percepatan pembangunan manusia, sehingga dapat menjadi percontohan bagi daerah lain. Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh harus melakukan kajian mendalam dan komprehensif sebelum menyetujui usulan pemekaran daerah kabupaten/kota, diantaranya kesiapan daerah baru, pembagian sumber daya yang adil antara daerah induk dan calon daerah pemekaran baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan infrastruktur sehingga tercapai efektivitas pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah kabupaten/kota khususnya daerah pemekaran harus terus-menerus meningkatkan perekonomian sesuai keunggulan daerah masing-masing baik sektor pertanian, industri maupun jasa karena terbukti meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Juga melakukan upaya pengurangan kemiskinan dengan lebih agresif melalui program-program anti kemiskinan terutama yang bersifat spesifik lokal sehingga lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia agar bisa setara atau bahkan lebih baik dari daerah induknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisman. 2018. Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 7(1), 113-122.
- Balkar, B., & M. G. Kasurka. 2015. Decentralization as an Educational Planning Strategy in Turkish Education System. *International Journal of Education*. 7(2), 415-436.
- Baltagi, B.H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*. 3rd Ed. Chicester: Jhon Wiley & Sons.
- BAPPENAS. 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*. Jakarta: BAPPENAS.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2010-2016 (Metode Baru). <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2007–2017*.

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1219>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2018.

Badan Pusat Statistik. 2018. Konsep Indeks Pembangunan Manusia. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan> manusia.html#subjekViewTab1. Diakses pada tanggal 2 Maret 2018.

Badan Pusat Statistik. 2018. Konsep Persentase Penduduk Miskin. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2018.

Cahill, M. B. 2005. Is The Human Development Index Redundant? *Eastern Economic Journal*, 31 (1), 1-5.

Chalid, N & Y. Yusuf. 2014. Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*. 22 (2),1-12.

Eren, M, A.K. Celik & A. Kubat. 2014. Determinants of the Levels of Development Based on the Human Development Index: A Comparison of Regression Models for Limited Dependent Variables. *Review of European Studies*. 6 (1), 10-22.

Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.

Jumadi, M. Pudjiharjo, G. Maski, & M. Khusaini. 2013. The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development in East Java. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*. 13(1), 1-7.

Kartasmita, Ginanjar. (1994). *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.

Kementerian Dalam Negeri. 2015. *Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Di Indonesia Sampai Dengan Tahun 2014*.

Singariya, M.R. 2014. Socioeconomic Determinants of Human Development Index in India. *Management and Administrative Sciences Review*. 6 (3), 69-84.

Soejoto, A., W.T. Subroto & Suyanto. 2015. Fiscal Decentralization Policy in Promoting Indonesia Human Development. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(3), 763-771.

- Sofilda, E, M.Z. Hamzah, & A.S. Sholeh. 2013. Human Development and Poverty in Papua Province (An Analysis of Simultaneous Approach on Panel Data Regression). OIDA International Journal of Sustainable Development. 6 (6), 51-62.
- Sofilda, E., P. Hermiyanti & M.Z. Hamzah. 2015. Determinant Variable Analysis of Human Development Index in Indonesia (Case For High And Low Index At Period 2004 – 2013). OIDA International Journal of Sustainable Development. 9 (8), 11-28.
- Todaro, M.P. 1998. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga, Jakarta.
- UNDP. 2016. Human Development Report 2016. New York : UNDP.